

Dinamika Pedagang Kaki Lima di Sekitar Gerbang Kampus Universitas Riau

Aulia Sari Rambe¹ Fadila Azzahra² Hambali³ Husnul Khoti Rifani⁴ Rizky Dinda Sarmita⁵
Salma Assyfa Mufidahna⁶ Suci Nur Hidayah⁷

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Riau, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Indonesia^{1,2,3,4,5,6,7}

Email: aulia.sari5188@student.unri.ac.id¹ fadila.azahra4400@student.unri.ac.id²
hambali@lecturer.unri.ac.id³ husnul.khoti1856@student.unri.ac.id⁴
rizky.dinda@lecturer.unri.ac.id⁵ salma.assyfa3578@student.unri.ac.id⁶
suci.nurhidayah2379@student.unri.ac.id⁷

Abstract

Street vendors (PKL) around the University of Riau are part of the local economic activities that have grown along with the increasing needs of students. Their presence not only serves as providers of food and daily necessities but also reflects the socio-economic dynamics within the campus environment. The buying and selling activities between vendors and students create mutually beneficial relationships, especially due to affordable prices and easy access. However, on the other hand, the existence of these vendors also causes problems such as traffic congestion, waste accumulation, and disturbances to campus orderliness. The university administration and public order officers view the need for proper management so that economic activities can continue without disrupting the academic environment. Therefore, maintaining a balance between economic empowerment and environmental order is essential to achieve harmony around the campus.

Keywords: Street Vendors, Economic Activity, Students, Campus

Abstrak

Pedagang kaki lima (PKL) di sekitar Kampus Universitas Riau merupakan bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat yang tumbuh seiring meningkatnya kebutuhan mahasiswa. Kehadiran mereka tidak hanya berfungsi sebagai penyedia makanan dan kebutuhan sehari-hari, tetapi juga mencerminkan dinamika sosial ekonomi di lingkungan kampus. Aktivitas jual beli antara pedagang dan mahasiswa menciptakan hubungan yang saling menguntungkan, terutama karena harga yang terjangkau dan kemudahan akses. Namun, di sisi lain, keberadaan PKL juga menimbulkan persoalan seperti kemacetan, penumpukan sampah, dan gangguan ketertiban di sekitar kampus. Pihak kampus dan Satpol PP menilai perlu adanya penataan agar kegiatan ekonomi tetap berjalan tanpa mengganggu kenyamanan lingkungan akademik. Oleh karena itu, keseimbangan antara pemberdayaan ekonomi dan ketertiban lingkungan menjadi hal penting untuk diwujudkan.

Kata Kunci: Pedagang Kaki Lima, Aktivitas Ekonomi, Mahasiswa, Kampus



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) merupakan fenomena sosial ekonomi yang lazim ditemukan di berbagai kawasan perkotaan, termasuk di lingkungan sekitar perguruan tinggi. Aktivitas ekonomi ini tumbuh sebagai bagian dari dinamika masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan hidup melalui cara-cara yang fleksibel dan adaptif. Di tengah keterbatasan lapangan kerja formal dan tingginya biaya hidup, menjadi pedagang kaki lima sering kali dipandang sebagai jalan realistik untuk bertahan hidup. Di kawasan kampus Universitas Riau, misalnya, aktivitas para pedagang ini telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan mahasiswa dan masyarakat sekitar. Setiap hari, area di depan gerbang kampus dipadati oleh interaksi ekonomi antara pedagang dan pembeli yang menunjukkan tingginya intensitas kegiatan sosial di ruang publik kampus. Keterbatasan

dalam lapangan pekerjaan formal mendorong banyak orang untuk beralih ke sektor informal, seperti menjadi pedagang kaki lima (PKL) di sekitar kampus Universitas Riau. Fenomena ini selaras dengan penelitian (Nurwinda & Listyaningsih, n.d.) yang menunjukkan bahwa sektor informal berkembang akibat tekanan ekonomi dan kesenjangan dalam peluang kerja, sehingga memberikan kesempatan mobilitas horizontal bagi kelompok berpendapatan rendah. Memilih menjadi PKL bukan hanya keputusan ekonomi semata, melainkan juga bagian dari upaya untuk menjaga atau meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui pekerjaan yang mudah diakses dan memerlukan modal kecil.

Sebagian besar PKL di kawasan ini menggunakan sarana berdagang sederhana seperti tenda bongkar pasang, gerobak dorong, atau kendaraan roda dua dan empat yang diubah menjadi warung keliling. Fleksibilitas ini mencerminkan kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap situasi dan perubahan lingkungan. Jenis dagangan yang mereka tawarkan pun bervariasi, mulai dari makanan siap saji, minuman ringan, hingga kebutuhan harian mahasiswa. Dengan harga yang relatif terjangkau dan lokasi yang mudah dijangkau, keberadaan mereka secara tidak langsung mendukung aktivitas keseharian mahasiswa dan civitas akademika. Dalam hal ini, PKL berperan penting sebagai penyedia kebutuhan konsumsi cepat, serta turut menggerakkan ekonomi lokal di sekitar kampus. Namun di sisi lain, keberadaan pedagang kaki lima juga menimbulkan berbagai persoalan yang mencerminkan adanya konflik kepentingan di ruang publik. Ruang yang digunakan oleh pedagang sebenarnya merupakan fasilitas umum yang juga dipakai oleh mahasiswa, dosen, dan masyarakat lain. Ketika trotoar dan bahu jalan dijadikan tempat berdagang, muncul persoalan seperti kemacetan, berkurangnya kenyamanan pengguna jalan, hingga masalah kebersihan dan tata ruang. Dari perspektif kampus dan pemerintah daerah, kondisi ini dianggap mengganggu ketertiban dan estetika lingkungan pendidikan. Akan tetapi, dari sisi pedagang, aktivitas tersebut merupakan bentuk perjuangan ekonomi untuk mempertahankan hidup di tengah keterbatasan kesempatan kerja. Ketegangan inilah yang menggambarkan konflik sosial di tingkat lokal: antara kebutuhan ekonomi masyarakat kecil dan tuntutan ketertiban institusi formal. Dari sisi mahasiswa, persepsi terhadap keberadaan pedagang kaki lima pun beragam. Sebagian mahasiswa merasa keberadaan PKL sangat membantu karena menyediakan makanan dengan harga murah dan suasana yang lebih santai dibandingkan kantin kampus. Namun, ada pula yang merasa terganggu karena dampaknya terhadap kebersihan, kemacetan, dan kesan semrawut di sekitar gerbang kampus.

Perbedaan pandangan ini mencerminkan dilema yang lebih besar: bagaimana menciptakan keseimbangan antara kenyamanan dan kepedulian sosial, antara keteraturan ruang dan keberlangsungan ekonomi rakyat kecil. Aktivitas pedagang kaki lima (PKL) di sekitar Universitas Riau tidak hanya mencerminkan dinamika ekonomi lokal, tetapi juga memperlihatkan keterkaitan antara mobilitas sosial, kebijakan pemerintah, dan nilai-nilai moral dalam kehidupan masyarakat. Situasi ini menunjukkan bahwa keberadaan PKL tidak dapat dilihat sekadar sebagai aktivitas jual beli, melainkan sebagai bagian dari strategi bertahan hidup kelompok ekonomi kecil di tengah keterbatasan lapangan kerja formal. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk memahami bagaimana aktivitas ekonomi PKL berlangsung, apa motivasi mereka berdagang, serta bagaimana pandangan pihak kampus, Satpol PP, dan mahasiswa terhadap keberadaan mereka. Melalui kajian ini, diperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai hubungan antara aspek ekonomi, sosial, dan moral yang membentuk dinamika ruang publik di sekitar kampus. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi penataan yang adil dan berkelanjutan, yaitu kebijakan yang mampu menyeimbangkan antara hak ekonomi masyarakat kecil dan tanggung jawab institusi pendidikan serta pemerintah dalam menjaga ketertiban dan kenyamanan lingkungan kampus.

Aktivitas ekonomi pedagang kaki lima (PKL) di sekitar kawasan kampus dapat dipahami sebagai bagian dari dinamika sektor informal yang tumbuh di tengah keterbatasan lapangan kerja formal. (Widjajanti, 2012) menjelaskan bahwa fenomena PKL merupakan wujud dari struktur ekonomi perkotaan yang bersifat *dualistic* terjadi antara sektor formal dan informal yang saling berhubungan dalam ruang kota. Di kawasan pendidikan seperti Tembalang, Kota Semarang, kegiatan PKL muncul secara spontan di sekitar kampus karena adanya hubungan fungsional antara kebutuhan mahasiswa dan peluang ekonomi masyarakat sekitar. Kegiatan ini memperlihatkan adanya keterkaitan saling menguntungkan antara aktivitas pendidikan dan perdagangan informal. Mahasiswa sebagai konsumen membutuhkan makanan dan barang dengan harga terjangkau, sementara PKL memperoleh keuntungan dari kedekatan lokasi dan tingginya permintaan. Fenomena serupa juga tampak di sekitar Universitas Riau, di mana ruang publik sekitar kampus menjadi arena interaksi antara kebutuhan ekonomi masyarakat dan aktivitas sivitas akademika. Dalam konteks mobilitas sosial, PKL dapat dipandang sebagai kelompok yang mengalami mobilitas horizontal, yaitu perpindahan jenis pekerjaan dalam tingkat sosial ekonomi yang relatif sama. Selain itu, keterbatasan akses terhadap sektor formal menunjukkan adanya mobilitas struktural yang mendorong masyarakat masuk ke sektor informal.

Secara sosial-ekonomi, motivasi utama PKL untuk berjualan di kawasan kampus berakar pada kebutuhan bertahan hidup dan keinginan meningkatkan kesejahteraan keluarga. (Khairullah et al., 2022) menunjukkan bahwa sebagian besar pedagang kaki lima beroperasi di ruang publik bukan karena pilihan bebas, melainkan karena keterbatasan modal, rendahnya tingkat pendidikan, dan sempitnya akses terhadap pekerjaan formal. Mereka memanfaatkan lokasi yang strategis di sekitar pusat aktivitas masyarakat, termasuk kampus, untuk menjangkau konsumen yang potensial. Strategi bertahan yang dilakukan meliputi menjaga kualitas produk, menetapkan harga yang terjangkau, memilih lokasi yang ramai, serta memberikan pelayanan yang baik kepada pembeli. Strategi ini bersifat adaptif dan pragmatis, mencerminkan kemampuan PKL membaca situasi pasar serta menyesuaikan diri terhadap perubahan sosial seperti pandemi atau kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat. Namun, keberadaan PKL di ruang publik, termasuk di sekitar kampus, seringkali memunculkan ketegangan antara otoritas formal dan pelaku ekonomi informal. (Rahmawati Dwi & Fauzi Mahcfud, 2021) menyoroti bahwa aktivitas PKL tidak hanya mencerminkan upaya bertahan hidup, tetapi juga bentuk “perebutan ruang publik” dalam konteks politik ruang kota. Ruang kota tidak bersifat netral, melainkan arena pertemuan antara struktur kekuasaan (pemerintah, aparat keamanan, dan pengelola ruang publik) dengan agen sosial (PKL) yang berusaha mempertahankan keberadaannya. Konflik ini sering muncul dalam bentuk penertiban, penggusuran, atau kebijakan pembatasan yang justru memperlihatkan ketimpangan antara kebutuhan ekonomi masyarakat kecil dan kepentingan tata ruang perkotaan.

Pandangan ini sejalan dengan temuan (Kinanti Mauren et al., 2024) di Pekanbaru, yang menunjukkan bahwa meskipun sudah ada Peraturan Walikota Nomor 100 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL, pelaksanaannya belum berjalan efektif. Pengawasan lemah, koordinasi antarinstansi tidak solid, dan minimnya alternatif lokasi berdagang menyebabkan PKL kembali mengokupasi area publik setelah ditertibkan. Pandangan pihak kampus dan aparat seperti Satpol PP terhadap keberadaan PKL umumnya menekankan aspek ketertiban, estetika, dan keamanan lingkungan. Kampus dipandang sebagai ruang pendidikan yang perlu dijaga dari aktivitas ekonomi informal yang dianggap semrawut atau mengganggu. Namun, pendekatan penertiban semata seringkali tidak menyentuh akar persoalan, yaitu kebutuhan ekonomi masyarakat yang menggantungkan

hidup dari aktivitas berdagang di ruang publik. Sementara itu, mahasiswa sebagai pengguna ruang kampus justru memiliki persepsi yang lebih ambivalen. Sebagian besar mahasiswa menganggap PKL memiliki fungsi sosial yang positif karena menyediakan kebutuhan harian dengan harga terjangkau dan menciptakan suasana hidup di sekitar kampus. Akan tetapi, mereka juga menyadari dampak negatif seperti kebersihan lingkungan yang menurun, kemacetan, atau kesemrawutan tata ruang. Pandangan mahasiswa ini memperlihatkan dimensi moral yang menarik: di satu sisi, empati terhadap perjuangan ekonomi masyarakat kecil; di sisi lain, kesadaran akan pentingnya ketertiban dan keindahan ruang kampus. Dalam konteks moralitas sosial, konflik antara penertiban dan kebutuhan ekonomi PKL mencerminkan dilema etis antara kepentingan kolektif dan kelangsungan hidup individu. Di satu sisi, pemerintah memiliki kewajiban menegakkan aturan demi keteraturan kota dan kenyamanan publik. Di sisi lain, setiap warga, termasuk PKL, memiliki hak untuk bekerja dan memperoleh penghidupan yang layak sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Ketidakseimbangan antara dua nilai tersebut menimbulkan bentuk konflik moral.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian bukan untuk mengukur fenomena secara kuantitatif, melainkan untuk memahami secara mendalam bagaimana aktivitas ekonomi pedagang kaki lima berlangsung di sekitar Kampus Universitas Riau, apa motivasi mereka, serta bagaimana pandangan pihak kampus, mahasiswa, dan Satpol PP terhadap keberadaannya. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya menggambarkan situasi nyata di lapangan berdasarkan perspektif para pelaku dan pihak yang terlibat. Penelitian dilaksanakan di kawasan sekitar Kampus Universitas Riau, khususnya di area depan gerbang utama dan jalan-jalan sekitar yang menjadi lokasi utama aktivitas PKL. Lokasi ini dipilih karena merupakan pusat interaksi antara pedagang, mahasiswa, dan pengguna jalan. Penelitian dilaksanakan selama bulan Oktober hingga November 2025, dengan menyesuaikan waktu kegiatan lapangan, observasi, dan wawancara.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap para pedagang kaki lima, mahasiswa, pihak kampus, serta petugas Satpol PP. Data ini digunakan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai aktivitas ekonomi pedagang kaki lima di sekitar kampus Universitas Riau dan persepsi berbagai pihak terhadap keberadaan mereka. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber tertulis seperti jurnal ilmiah, artikel, serta dokumen resmi pemerintah daerah yang membahas tentang penataan pedagang kaki lima, sektor informal, dan kebijakan tata ruang di kawasan pendidikan. Kedua jenis data tersebut saling melengkapi dalam memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap fenomena yang diteliti. Dalam proses pengumpulan data, penelitian ini menggunakan beberapa teknik agar hasil yang diperoleh akurat dan relevan. Teknik pertama adalah observasi langsung yang dilakukan di area sekitar kampus Universitas Riau untuk mengamati secara mendetail pola aktivitas PKL, jenis dagangan yang dijual, waktu operasional, serta kondisi lingkungan dan lalu lintas di sekitar lokasi penelitian. Teknik kedua adalah wawancara semi-terstruktur, yang dilakukan terhadap beberapa kelompok informan utama, yaitu PKL yang berjualan di sekitar kampus, mahasiswa sebagai konsumen, pihak kampus seperti bagian keamanan atau satpam, dan petugas Satpol PP sebagai pihak penegak ketertiban. Bentuk wawancara semi-terstruktur dipilih karena memungkinkan peneliti memiliki panduan pertanyaan dasar namun tetap memberi ruang

bagi informan untuk menyampaikan pandangan dan pengalaman secara bebas dan mendalam.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif dengan menggunakan model analisis interaktif. Analisis ini terdiri dari tiga tahap utama, yaitu pemilahan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tahap pemilahan data dilakukan dengan cara memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan data mentah hasil observasi maupun wawancara agar tetap relevan dengan rumusan masalah penelitian. Tahap penyajian data dilakukan dengan menyusun hasil temuan ke dalam uraian naratif yang sistematis untuk menggambarkan kondisi lapangan secara jelas dan terstruktur. Selanjutnya, tahap penarikan kesimpulan dilakukan dengan menafsirkan makna dari data yang telah disajikan guna menjawab pertanyaan penelitian serta menemukan hubungan antara aktivitas ekonomi pedagang kaki lima, persepsi para pihak yang terlibat, dan upaya penataan lingkungan kampus. Dalam penyajian data, nama informan disamarkan menggunakan inisial untuk menjaga kerahasiaan identitas mereka sesuai dengan etika penelitian sosial. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik perbandingan terkait sumber dan metode. Artinya, data yang diperoleh dari satu sumber, seperti pedagang kaki lima, dibandingkan dengan data dari sumber lain seperti mahasiswa, pihak kampus, atau Satpol PP, kemudian dikonfirmasi kembali melalui metode berbeda seperti observasi dan dokumentasi. Perbandingan ini bertujuan untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas hasil penelitian, sehingga temuan yang dihasilkan dapat dipercaya serta mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Aktivitas ekonomi pedagang kaki lima (PKL) di sekitar Kampus Universitas Riau berlangsung secara dinamis dan beragam, menyesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa, pegawai kampus, dan masyarakat sekitar. Seperti temuan (Moresta Lativa Aliftania, Utami Estu Nastiti, n.d.), pola aktivitas PKL di kawasan pendidikan umumnya dipengaruhi oleh ritme kehidupan akademik yang dimulai sejak pagi hingga siang didominasi pedagang makanan berat dan jasa kebutuhan kuliah seperti fotokopi dan print, sedangkan sore hingga malam lebih banyak pedagang jajanan dan minuman. Pola ini menunjukkan adanya hubungan saling bergantung antara sektor informal dan komunitas kampus, di mana keberadaan mahasiswa menjadi motor utama perputaran ekonomi. Namun, aktivitas ekonomi ini juga menimbulkan dilema. Berdasarkan temuan (Yahya et al., 2022), keberadaan PKL kerap memengaruhi kinerja jalan, menambah kepadatan, bahkan menurunkan kecepatan arus lalu lintas di kawasan padat. Fenomena serupa dapat ditemukan di sekitar Universitas Riau, di mana lokasi berjualan yang berdekatan dengan area kampus sering menyebabkan kemacetan dan penurunan estetika lingkungan. Di sinilah muncul konflik kepentingan antara kebutuhan ekonomi rakyat kecil untuk bertahan hidup dan tuntutan ketertiban serta kenyamanan lingkungan akademik.

Motivasi Para Pedagang Kaki Lima Berjualan di sekitar kampus

Kota Pekanbaru saat ini menjadi salah satu destinasi utama bagi para perantau dari berbagai wilayah di Indonesia. Banyak orang datang dengan beragam tujuan, ada yang ingin melanjutkan pendidikan atau menempuh studi, dan ada pula yang datang untuk mencari pekerjaan. Mereka beranggapan bahwa di kota besar seperti Pekanbaru, peluang kerja lebih terbuka lebar. Selain itu, mereka juga tertarik oleh cerita-cerita yang menggambarkan kehidupan di kota sebagai sesuatu yang menyenangkan karena segala kebutuhan mudah didapat. Faktor lain yang mendorong mereka merantau adalah semakin terbatasnya lapangan

pekerjaan di daerah asal. Fenomena meningkatnya jumlah pedagang kaki lima (PKL) di kawasan kampus Universitas Riau ini juga menjadi perhatian pemerintah daerah karena menyangkut aspek ketertiban, kebersihan, dan penataan kota. (Al kahfi David, 2018). Dalam menjalankan suatu kegiatan usaha, terdapat berbagai hal yang harus dipertimbangkan oleh para pelaku usaha. Selain berfokus pada kualitas produk selama proses produksi, mereka juga perlu memperhatikan aspek penting lainnya, yaitu lokasi usaha.

Pemilihan lokasi menjadi faktor yang cukup krusial karena produk yang dijual harus sesuai dengan kebutuhan konsumen atau target pasar. Ketika menentukan lokasi tertentu, para pelaku usaha biasanya memiliki harapan agar produk yang mereka tawarkan dapat menarik perhatian konsumen sehingga tujuan utama, yakni memperoleh keuntungan dapat tercapai. Dan saat ini banyak pedagang kaki lima yang memilih untuk berjualan disekitar kampus Universitas Riau terkhususnya di depan gerbang kampus Universitas Riau, di pinggir jalan HR Soebrantas Pekanbaru, karena Dalam menentukan lokasi berjualan yang tepat, pedagang umumnya memilih tempat yang dekat dengan pelanggan atau target pasar mereka. Hal ini dilakukan agar mereka dapat memberikan pelayanan terbaik serta membangun hubungan yang baik dengan para pelanggan. Para pelaku usaha, khususnya pedagang, cenderung sangat berhati-hati dalam menentukan lokasi usahanya, karena kesalahan dalam memilih lokasi dapat berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha. Jika lokasi yang dipilih tidak strategis, maka kegiatan usaha akan terhambat dan berpengaruh terhadap target pasar yang ingin dicapai. (Setiaji Fikri et al., 2023).

Menurut penuturan Ibu L (pedagang kaki lima) dan Pak R (pedagang kaki lima) yang berjualan di depan gerbang Universitas Riau, motivasinya berdagang di depan gerbang Universitas Riau Karena faktor ekonomi, ini adalah motivasi yang paling mendasar bagi PKL karena berjualan adalah cara utama bagi mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup demi kesejahteraan keluarganya. Para pedagang juga memanfaatkan lokasi yang strategis untuk mendapatkan potensi pelanggan yang besar, prospeknya yang bagus, dan target pasar mereka juga adalah anak kuliah serta pekerja yang lewat, banyaknya mahasiswa di Universitas Riau dan pengendara jalan sehingga membuat omzet penjualan mereka cenderung stabil dan selalu ramai. Kedekatan lokasi yang berada di sekitar gerbang atau jalan utama menuju kampus menjadi salah satu alasan utama para pedagang memilih menetap di area sekitar Universitas Riau, karena dapat meningkatkan visibilitas dan kemudahan akses bagi pembeli. Lingkungan kampus sendiri memiliki potensi konsumen yang tinggi, dengan populasi mahasiswa, dosen, staf, serta pengunjung yang ramai dan terus beraktivitas. Kondisi tersebut memastikan tersedianya pelanggan potensial setiap hari.

Permintaan yang konsisten terhadap makanan, minuman, serta kebutuhan sehari-hari dengan harga terjangkau membuat area kampus semakin diminati. Pedagang kaki lima (PKL) umumnya menawarkan produk dengan harga yang lebih murah dibandingkan toko modern atau kafe, sehingga lebih menarik bagi mahasiswa yang memiliki anggaran terbatas. Selain itu, PKL juga menyediakan layanan ekonomi yang cepat dan mudah dijangkau di tepi jalan atau trotoar sekitar kampus, sehingga konsumen dapat dengan mudah membeli sambil beraktivitas. Modal yang dibutuhkan untuk berjualan sebagai PKL relatif kecil, dan hambatan birokrasi untuk memulai usaha juga lebih ringan dibandingkan dengan usaha formal. Hal ini menjadikan profesi tersebut sebagai pilihan yang mudah diakses oleh banyak orang, termasuk para pendatang di kota Pekanbaru. Karena alasan-alasan inilah yang disebutkan para PKL di kampus, maka banyak pedagang kaki lima yang memilih berjualan di area depan gerbang Universitas Riau.

Dari sisi moral serta tanggung jawab sosial, aktivitas berdagang yang dilakukan oleh para pedagang kaki lima (PKL) mencerminkan nilai kemanusiaan dan perjuangan hidup yang

nyata. Banyak di antara mereka berjualan bukan hanya demi mencari keuntungan, tetapi juga sebagai wujud tanggung jawab terhadap keluarga. Usaha berdagang menjadi cara mereka untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, membiayai pendidikan anak, serta mempertahankan kelangsungan hidup. (Kinanti Mauren et al., 2024). Namun, di sisi lain, para pedagang sering dihadapkan pada dilema moral. Mereka harus berjuang mencari nafkah secara layak, sementara terdapat aturan pemerintah mengenai ketertiban umum dan penataan ruang kota yang membatasi aktivitas berdagang tersebut. Di kota Pekanbaru, misalnya, terdapat imbauan dari Satpol PP yang menegaskan larangan bagi PKL untuk berjualan di badan jalan, bahu jalan, trotoar, atau fasilitas umum karena dianggap mengganggu ketertiban. Situasi ini menuntut adanya kesadaran moral, baik dari pihak pedagang agar tetap menjaga kebersihan, ketertiban, dan menaati peraturan, maupun dari pihak pemerintah untuk lebih manusiawi serta memberikan ruang usaha yang layak bagi masyarakat kecil.

Pandangan Pihak Kampus dan Satpol PP terhadap Keberadaan Pedagang Kaki Lima

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menata dan mengatur keberadaan PKL. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, pemerintah daerah wajib menyediakan lokasi yang layak bagi PKL serta melakukan pembinaan agar tidak mengganggu ketertiban umum. Namun, dalam praktiknya sering muncul dilema antara penegakan aturan dan pertimbangan sosial-ekonomi. (Suharto, 2006). PKL berperan besar dalam menggerakkan perekonomian kota, terutama dalam menyediakan barang dan jasa dengan harga terjangkau serta menyerap tenaga kerja. Meski memiliki kontribusi positif, keberadaan PKL sering menimbulkan persoalan seperti gangguan ketertiban, kemacetan, dan pelanggaran tata ruang kota. Konflik antara kebutuhan ekonomi masyarakat kecil dan kebijakan tata ruang kota mencerminkan ketegangan antara rasionalitas ekonomi dan rasionalitas sosial. Penelitian lain juga menemukan bahwa PKL sering menempati fasilitas publik seperti trotoar dan bahu jalan, yang berdampak pada estetika dan keteraturan kota. Oleh karena itu, penanganan PKL membutuhkan pendekatan kebijakan yang berimbang antara fungsi ekonomi dan kepentingan ruang publik. (Fadillah, 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu petugas keamanan kampus Universitas Riau, yaitu bapak HJ diperoleh keterangan bahwa pihak keamanan kampus tidak memiliki hubungan langsung dengan keberadaan pedagang kaki lima di sekitar wilayah kampus. Petugas menyampaikan bahwa "Kami tidak memiliki kewenangan untuk mengatur pedagang kaki lima, karena mereka berjualan di pinggir jalan raya, bukan di dalam lingkungan kampus. Jadi, itu sudah menjadi kewenangan pemerintah daerah, bukan pihak kampus." Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa pihak kampus memandang keberadaan PKL bukan sebagai tanggung jawab institusi kampus, selama aktivitas perdagangan tidak mengganggu ketertiban dan kebersihan di area dalam kampus. Jika ditinjau dari perspektif tanggung jawab sosial universitas, pandangan tersebut menunjukkan adanya jarak antara peran akademik kampus dan realitas sosial di sekitarnya. Sebagai institusi pendidikan tinggi, kampus idealnya tidak hanya menjadi pusat ilmu pengetahuan, tetapi juga agen perubahan sosial yang peduli terhadap kesejahteraan masyarakat di lingkungannya. Kampus dapat berperan aktif melalui program pemberdayaan, pelatihan kewirausahaan, atau pengelolaan zona ekonomi mikro bagi PKL di sekitar wilayahnya. Dengan demikian, tanggung jawab sosial kampus tidak berhenti pada batas administratif wilayah, tetapi meluas pada komitmen moral untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar.

Dalam konteks ini, sikap pasif terhadap keberadaan PKL bisa dilihat sebagai bentuk “netralitas administratif” yang etis dari sisi aturan, tetapi belum sepenuhnya memenuhi dimensi tanggung jawab sosial universitas. Seharusnya, kampus dapat mengambil peran kolaboratif dengan pemerintah daerah untuk menciptakan ruang ekonomi yang tertib sekaligus manusiawi bagi para pedagang kecil. Sementara itu, hasil wawancara dengan pihak Satpol PP Kota Pekanbaru yaitu bapak IS menunjukkan bahwa keberadaan pedagang kaki lima diatur secara selektif. Pihak Satpol PP menyampaikan “Ada beberapa daerah yang memang diizinkan untuk keberadaan PKL, seperti di kawasan Cut Nyak Dien dan di depan Masjid Raya An-Nur karena di wilayah tersebut ada ormas yang mengajukan permohonan izin berjualan. Namun di sisi lain kami menghadapi kesulitan dalam menegakkan peraturan, karena pada umumnya pedagang berjualan atas dasar kebutuhan ekonomi.” Meski begitu, dari pihak Satpol PP tidak sembarangan untuk mengizinkan kegiatan PKL, mereka mempertimbangkan wilayah-wilayah yang ramai, misalnya wilayah padat anak sekolah.

Petugas juga menambahkan bahwa proses penertiban tidaklah mudah “Kami bekerja sama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) dan Dinas Perhubungan (Dishub) dalam pelaksanaan di lapangan. Disperindag mengatur izin dan pembinaan, sedangkan Dishub membantu menertibkan arus lalu lintas saat operasi dilakukan. Tapi kendalanya, banyak PKL yang kabur saat kami datang, bahkan ada yang bersikap anarkis, marah, melempar barang, atau menolak dipindahkan. Ini yang membuat prosesnya sulit.” Menurut mereka, situasi seperti ini sering muncul karena PKL merasa tindakan penertiban mengancam sumber penghidupan mereka. Oleh karena itu, Satpol PP mengaku lebih sering menggunakan pendekatan persuasif terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan tegas. Satpol PP juga menekankan bahwa meskipun ada aturan tentang ketertiban umum, pendekatan yang dilakukan harus bersifat persuasif dan manusiawi, mengingat banyaknya PKL yang menggantungkan hidup dari aktivitas tersebut. Dari wawancara ini, dapat dilihat bahwa Satpol PP memiliki kesadaran sosial yang cukup tinggi terhadap realitas ekonomi masyarakat kecil. Pandangan Satpol PP menggambarkan dilema moral yang nyata. Di satu sisi, mereka memiliki kewajiban menegakkan peraturan daerah demi ketertiban umum, namun di sisi lain mereka menyadari bahwa tindakan tegas bisa berdampak langsung pada sumber penghidupan masyarakat kecil. Sikap persuasif yang diutamakan menunjukkan adanya kesadaran moral dan empati sosial dalam pelaksanaan tugas birokratis. Namun, dilema ini juga mencerminkan perlunya pendekatan kebijakan yang lebih integratif, di mana penegakan aturan tidak hanya berfokus pada penertiban fisik, tetapi juga mencakup upaya pemberdayaan ekonomi dan kolaborasi lintas lembaga.

Persepsi Mahasiswa sebagai Konsumen terhadap Pedagang

Kegiatan pedagang kaki lima merupakan suatu kegiatan perekonomian rakyat kecil yang bermodal sedikit, dimana pedagang mendapatkan komisi yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Para pedagang tersebut menggunakan ruas jalan pejalan kaki sebagai tempat berdagang ataupun berjualan. Oleh karena itu dianggap mengganggu lalu lintas para pengguna jalan dan pengguna kendaraan. (Munawarah, 2022). Kebanyakan PKL memilih berjualan di tempat keramaian, seperti di stasiun bus dan kereta, atau halte-halte. Lokasi merupakan tempat usaha yang sangat mempengaruhi keinginan seseorang konsumen untuk datang dan berbelanja. (Wibowo Fitriana Fatma et al., 2021). Penentuan lokasi usaha sangat penting bagi sebuah usaha baru yang akan memulai operasi maupun ketika usaha itu telah berjalan dan berkembang. Penentuan lokasi usaha yang tepat sangat menentukan keberhasilan dan kegagalan usaha dimasa yang akan datang, selain itu penentuan lokasi usaha yang tepat akan menjadikan suatu usaha dapat beroperasi dengan lebih efisien dan

dapat mencapai pendapatan yang diharapkan. Dalam upaya mencari pembeli, pedagang akan mencari lokasi usaha yang sesuai atau strategis dilihat dari banyaknya konsumen, sehingga barang dagangannya mudah laku, dengan bertambahnya jumlah konsumen tentunya akan meningkatkan pendapatan bagi para pedagang, yang berarti meningkat pula jumlah pendapatan yang diperolehnya.

Salah satunya yaitu keberadaan pedagang kaki lima di depan Universitas Riau. Keberadaan pedagang kaki lima tepatnya didepan gerbang Universitas Riau tentunya memberikan dampak kepada mahasiswa, baik dampak positif maupun negatif. Berdasarkan hasil wawancara dengan ST (mahasiswa UNRI) sebagai konsumen dia mengatakan bahwa pedagang kaki lima memberikan manfaat kepada mahasiswa, karena bagi mahasiswa PKL merupakan penyelamat saat mereka lapar ataupun haus, mereka menyediakan banyak pilihan makanan atau minuman yang harganya terjangkau sesuai dengan kemampuan ekonomi mahasiswa yang rata-rata masih bergantung pada kiriman orang tua ataupun beasiswa serta tempat berjualan mereka yang strategis karena dekat. Keberadaan PKL juga memberikan manfaat bagi mahasiswa yang pejalan kaki, dengan adanya PKL ini memudahkan mereka untuk membeli makanan tanpa harus berjalan jauh. Selain itu, makanan yang dijual juga bervariasi sehingga tidak membuat mahasiswa bosan dan mahasiswa juga ikut membantu menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar kampus. Jadi, PKL dan mahasiswa saling mendapatkan keuntungan, yang dimana PKL mendapatkan penghasilan sedangkan mahasiswa mendapatkan kebutuhan mereka berupa makanan.

Namun, dibalik dampak positif tentunya ada dampak negatif yang ditimbulkan. Dari wawancara yang telah dilakukan dengan LA (mahasiswa Universitas Riau) dia mengatakan bahwa banyak juga mahasiswa yang beranggapan bahwa kemacetan yang terjadi itu disebabkan oleh pedagang kaki lima. Mahasiswa merasa terganggu karena aktivitas PKL ini, terutama pada jam-jam sibuk seperti pagi hari saat jam masuk kuliah dan jam masuk kerja serta sore hari saat jam pulang kuliah ataupun jam pulang kerja. Banyak kendaraan, yang berhenti mendadak untuk membeli, dan keadaan ini mempersempit jalan sehingga membuat arus lalu lintas tidak lancar. Pembeli yang parkir sembarangan juga menjadi faktor penyebab kemacetan. Dengan keadaan seperti ini bisa membahayakan pengendara yang lewat. Mahasiswa juga mengatakan agak susah buat lewat di pagi hari, terlebih pas lagi buru-buru dan alhasil mahasiswa terlambat buat masuk kelas. Lalu, menurut DK (mahasiswa Universitas Riau) dirinya juga merasa terganggu, karena wilayah ini memang dari tahun ke tahun itu selalu macet, karena PKL dan orang-orang yang jualan pakai gerobak itu sudah lama berjualan disana tapi tidak ada tindak lanjut dari pemerintah. Kalau misalnya ada setidaknya jalan itu bisa diperlebar atau ditambahkan lagi jalannya. Dan menurut dia selaku konsumen itu diuntungkan sekitar 30% , karena mahasiswa yang mau berangkat kekampus mungkin tidak sempat untuk sarapan atau makan siang jadi mahasiswa bisa mampir didepan unri tersebut, tapi kalo untuk kerugian bagi saya mungkin diangka 70%, jadi kenapa 70% itu karena tiap sore, pagi, apalagi malam minggu sebagai malam puncaknya, kadang kemacetan yang terjadi cukup panjang cuma karena PKL, tapi bukan berarti sepenuhnya PKL itu mengganggu.

Kemudian wawancara dilanjutkan dengan ISR (mahasiswa Universitas Riau) Dari kejadian ini, mahasiswa menyarankan agar dibuat area khusus untuk PKL, yang lokasinya strategis dan tidak terlalu jauh dari kampus. Lokasinya bisa memanfaatkan lahan kosong di sekitar kampus. Dan harapannya, area baru itu harus dilengkapi dengan tempat parkir yang memadai, khususnya untuk motor, sehingga pembeli tidak parkir sembarangan di jalan. Jika ditata dengan rapi, bersih, dan punya tempat parkir yang memadai, maka jual beli akan berjalan dengan nyaman, pedagang tetap ramai, dan jalanan di depan kampus bisa lancar. Tetapi, jika pemilihan lokasi agak jauh dari kampus, takutnya nilai jual beli berkurang dan

otomatis pendapatan PKL juga berkurang serta mahasiswa yang pejalan kaki juga sedikit susah. Secara umum, keberadaan PKL tepatnya di gerbang Universitas Riau menimbulkan pro dan kontra dari mahasiswa. Dari wawancara yang telah dilakukan mahasiswa yang mendukung kehadiran PKL di depan gerbang kampus memiliki alasan tersendiri, yang dimana mahasiswa merasa terbantu seperti kemudahan akses untuk mendapatkan makanan karena jarak yang tidak terlalu jauh. Dengan lokasi PKL yang strategis tersebut memudahkan mahasiswa untuk membeli makanan tanpa harus keluar jauh dari kampus meskipun jam kuliah lagi padat dan bagi mahasiswa yang tidak memiliki kendaraan mereka merasa sangat terbantu dengan kehadiran PKL ini. Selain itu, harga yang ditawarkan penjual lebih terjangkau dibandingkan di tempat lain seperti kafe sehingga mahasiswa tidak merasa keberatan untuk membeli. Hal ini, terutama mengacu kepada mahasiswa yang rata-rata anak kost yang masih bergantung pada kiriman orang tua dan pastinya mereka mikir terlebih dahulu sebelum membeli sesuatu. Dan mahasiswa memahami nilai sosial yang dimana mereka menyadari bahwa PKL merupakan seseorang yang sedang berjuang mencari nafkah untuk keluarganya. Dengan membeli dagangan tersebut mahasiswa secara tidak langsung sudah membantu ekonomi masyarakat sekitar.

Kemudian keberadaan PKL di depan gerbang universitas juga menimbulkan kontra dari mahasiswa. Banyak mahasiswa yang merasa bahwa keberadaan PKL yang berjualan di pinggir jalan membuat arus lalu lintas menjadi macet, terutama pada pagi hari dan sore hari. Lapak yang didirikan di pinggir jalan sering memakan jalan dan trotoar sehingga ruang gerak kendaraan dan pejalan kaki menjadi terbatas. Akibatnya, terjadi penumpukan kendaraan yang mengganggu kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan termasuk mahasiswa. Selain itu, kemacetan yang disebabkan oleh PKL juga memberikan dampak pada waktu mahasiswa. Banyak mahasiswa yang terlambat masuk kelas karena terjebak macet. Dari segi keselamatan, keberadaan PKL juga dianggap menimbulkan potensi berbahaya. Banyak kendaraan yang berhenti secara mendadak untuk membeli makanan ataupun minuman sehingga menimbulkan adanya resiko kecelakaan lalu lintas. Adapun konflik yang mungkin timbul antara pedagang kaki lima dengan mahasiswa adalah perbedaan kepentingan dan kebutuhan antara kedua pihak. Yang dimana PKL memilih berjualan di depan kampus karena lokasi tersebut sangat strategis dan ramai pembeli. Dengan jumlah mahasiswa yang banyak cukup menjanjikan bagi penjual untuk mendapatkan keuntungan. Disisi lain, mahasiswa merasa terganggu dengan keberadaan PKL tersebut, karena aktivitas jual beli yang menyebabkan kemacetan. Dan mahasiswa berharap adanya tempat khusus berjualan untuk para PKL sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas.

Perbedaan pandangan ini tidak hanya menunjukkan konflik kepentingan, tetapi juga menggambarkan dilema moral yang dihadapi mahasiswa sebagai konsumen dan warga kampus. Mereka berada di posisi yang ambigu, di satu sisi ingin mendukung ekonomi rakyat kecil, di sisi lain ingin lingkungan kampus yang tertib dan nyaman. Persepsi moral antara pedagang kaki lima dan mahasiswa bersifat saling mempengaruhi. Mahasiswa melihat PKL sebagai bagian dari masyarakat kecil yang sedang berjuang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Karena itu, mahasiswa sering merasa simpati melihat PKL yang sedang berjuang memenuhi kebutuhan hidup mereka. Hubungan ini dilengkapi dengan rasa saling menghargai diantara keduanya, mahasiswa membutuhkan PKL untuk memenuhi kebutuhan makan dengan harga terjangkau, sedangkan PKL menghormati mahasiswa sebagai pelanggan tetap yang menjadi sumber penghasilan mereka. Jadi, secara moral hubungan antara keduanya mencerminkan dinamika antara nilai empati, tanggung jawab, sosial dan kesadaran terhadap kepentingan bersama. Mahasiswa diharapkan mampu menumbuhkan sikap peduli terhadap keberadaan PKL sebagai sesama manusia yang berjuang untuk hidup,

sedangkan PKL diharapkan memiliki kesadaran untuk menjaga ketertiban, kebersihan dan keamanan. Dengan saling memahami dan menghormati antara satu sama lain hubungan moral antara PKL dan mahasiswa dapat terjalin dengan harmonis dan tentunya saling menguntungkan.

Upaya Mewujudkan Keseimbangan antara Kebutuhan Ekonomi dan Ketertiban Lingkungan Kampus

Untuk menyelesaikan berbagai persoalan tersebut, diperlukan kebijakan publik yang dirancang secara menyeluruh dan terkoordinasi. Pemerintah daerah perlu menunjukkan komitmen nyata dengan menyediakan lokasi berdagang yang layak dan strategis bagi PKL, melengkapi area tersebut dengan fasilitas yang memadai, serta memberikan pembinaan dan dukungan usaha secara berkelanjutan. Selain itu, koordinasi antarlembaga juga harus diperkuat agar penataan PKL berjalan konsisten dan tidak tumpang tindih. Penting pula memastikan bahwa kebijakan penataan PKL selaras dengan arah pembangunan ekonomi daerah dan rencana tata ruang kota. Jika langkah-langkah ini dijalankan dengan baik, penataan dan penertiban PKL dapat menjadi bagian penting dalam mendorong pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas. (Afrita Nur et al., 2025). Kebijakan pemerintah mengenai penataan PKL sangat diperlukan untuk mengatur aktivitas ekonomi informal ini tanpa mengganggu tatanan kota. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, pemberdayaan PKL harus dilakukan secara berkesinambungan melalui pengembangan iklim usaha yang kondusif dan penyediaan ruang usaha yang layak. (Podungge et al., 2025).

Pemerintah perlu menyusun kebijakan penataan yang mempertimbangkan kebutuhan strategis PKL, ketersediaan infrastruktur, dan kondisi sebenarnya di lapangan, agar tercipta lingkungan kota yang lebih tertib, bersih, dan manusiawi, tanpa mengesampingkan aspek pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil. (Ramadan et al., 2025). Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) di lingkungan kampus memiliki dua sisi yang saling berkaitan. Di satu sisi, pedagang berperan penting dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dan keseharian mahasiswa maupun civitas akademika. Namun di sisi lain, aktivitas perdagangan yang tidak tertata dapat menimbulkan gangguan terhadap ketertiban, kebersihan, dan estetika lingkungan kampus. Konflik utama yang sering muncul adalah pertentangan antara kepentingan ekonomi dan ketertiban lingkungan. Para pedagang membutuhkan ruang untuk mencari nafkah dan mempertahankan keberlangsungan ekonomi keluarga, sementara pihak kampus atau pemerintah menuntut keteraturan, keindahan, dan kebersihan ruang publik. Ketegangan ini menunjukkan adanya dilema sosial, di satu pihak ekonomi rakyat kecil harus terus berjalan; di pihak lain, tata ruang dan ketertiban umum perlu dijaga demi kepentingan bersama. Jika tidak dikelola dengan bijak, konflik ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan sosial, marginalisasi ekonomi, dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Sandhika et al., 2024) keseimbangan antara kebutuhan ekonomi pedagang dan ketertiban lingkungan dapat dicapai melalui pengaturan ruang yang terencana serta melibatkan semua pihak terkait. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa penataan lokasi berdagang yang memperhatikan konfigurasi ruang, aksesibilitas, serta fungsi lingkungan sekitar dapat mengurangi potensi konflik antara pedagang dan pengguna ruang lainnya. Selain itu, penyediaan fasilitas pendukung seperti tempat sampah, drainase, dan area khusus jualan menjadi langkah penting dalam menjaga kebersihan dan keteraturan area kampus. Pendekatan yang partisipatif antara pihak kampus dan pedagang juga mendorong rasa tanggung jawab bersama dalam menjaga ketertiban. Dari sisi moral, kebijakan penataan PKL bukan hanya sekadar instrumen pengendalian ruang

publik, tetapi juga wujud tanggung jawab sosial dan kemanusiaan pemerintah terhadap kelompok ekonomi lemah. Secara etis, pemerintah memiliki kewajiban untuk menegakkan keadilan *distributive*, yaitu memastikan bahwa setiap warga negara, termasuk pedagang kecil, memperoleh kesempatan yang adil untuk bekerja dan hidup layak.

Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Artinya, ketika pemerintah menyusun kebijakan penataan PKL yang berkeadilan, pemerintah tidak hanya menyelesaikan persoalan tata kota, tetapi juga menjalankan tanggung jawab moral untuk melindungi martabat manusia. Keadilan dalam konteks ini tidak hanya diukur dari keteraturan visual kota, tetapi juga dari seberapa jauh kebijakan tersebut menghormati hak-hak ekonomi kelompok kecil tanpa menyingkirkan mereka dari ruang publik. (Supriatna, 2021). Dengan demikian, penataan PKL yang baik menjadi jembatan moral antara kepentingan ekonomi dan ketertiban sosial. Kebijakan tersebut penting karena memperlihatkan bahwa pembangunan tidak boleh mengorbankan kemanusiaan. Pemerintah yang bijak adalah pemerintah yang mampu menata tanpa menggusur, mengatur tanpa mematikan usaha rakyat, dan menertibkan tanpa menghilangkan hak ekonomi masyarakat kecil. Kebijakan penataan PKL yang partisipatif, adil, dan manusiawi akan memperkuat kepercayaan publik, memperkecil konflik sosial, serta menciptakan keseimbangan antara aspek ekonomi, ketertiban, dan nilai-nilai moral dalam pembangunan daerah. Dengan demikian, kebijakan ini bukan hanya penting secara administratif, tetapi juga bermakna secara etis dan kemanusiaan, karena mencerminkan cita-cita luhur bangsa: mewujudkan kesejahteraan sosial yang berkeadilan. (Pulungan, 2017).

KESIMPULAN

Fenomena PKL di sekitar Universitas Riau juga dapat dipahami dalam kerangka mobilitas sosial, khususnya mobilitas horizontal, karena banyak pedagang berpindah dari pekerjaan sebelumnya ke aktivitas berdagang tanpa perubahan signifikan dalam status sosial. Kebijakan penataan yang diterapkan pemerintah berpotensi memengaruhi stabilitas posisi mereka, apakah tetap bertahan, mengalami peningkatan pendapatan, atau justru mengalami kerentanan ekonomi. Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) di sekitar Kampus Universitas Riau merupakan cerminan nyata dari dinamika sosial ekonomi masyarakat perkotaan yang kompleks. Aktivitas ekonomi mereka tumbuh secara alami sebagai respon terhadap kebutuhan konsumsi mahasiswa dan keterbatasan kesempatan kerja di sektor formal. Para pedagang berperan penting dalam menyediakan kebutuhan sehari-hari dengan harga terjangkau serta mendukung kehidupan ekonomi lokal. Namun, aktivitas tersebut juga menimbulkan persoalan ketertiban, kemacetan, dan kebersihan di sekitar kawasan kampus, sehingga memunculkan ketegangan antara kepentingan ekonomi dan keteraturan ruang publik. Motivasi utama para PKL berjualan di sekitar Universitas Riau didorong oleh faktor ekonomi dan lokasi strategis yang memberikan peluang pasar besar. Bagi sebagian besar pedagang, berdagang bukan sekadar pekerjaan, tetapi bentuk tanggung jawab moral terhadap keluarga untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Sementara itu, dari sisi pihak kampus dan Satpol PP, muncul dilema antara menegakkan aturan ketertiban dan mempertimbangkan aspek kemanusiaan. Kampus cenderung bersikap netral karena wilayah berjualan berada di luar kewenangannya, sedangkan Satpol PP menekankan pendekatan persuasif agar kebijakan penertiban tidak menimbulkan konflik sosial baru. Dari perspektif mahasiswa, keberadaan PKL menimbulkan pandangan yang beragam. Sebagian merasa terbantu karena kemudahan akses dan harga terjangkau, sementara sebagian lainnya menilai keberadaan PKL menyebabkan kemacetan dan ketidaknyamanan di lingkungan kampus. Perbedaan ini

menunjukkan adanya konflik kepentingan dan dilema moral antara empati terhadap pedagang kecil dan kebutuhan akan ketertiban lingkungan belajar.

Untuk menyeimbangkan kepentingan tersebut, diperlukan kebijakan publik yang terintegrasi, partisipatif, dan berkeadilan. Pemerintah daerah bersama pihak kampus perlu berkolaborasi menyediakan lokasi usaha yang tertata, fasilitas pendukung yang memadai, serta program pemberdayaan berkelanjutan bagi PKL. Pendekatan ini tidak hanya menertibkan, tetapi juga memberdayakan. Secara moral, kebijakan penataan PKL hendaknya berlandaskan nilai keadilan distributif, menjamin hak setiap warga negara untuk bekerja dan hidup layak sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945. Dengan demikian, keseimbangan antara kebutuhan ekonomi pedagang kaki lima dan ketertiban lingkungan kampus hanya dapat tercapai apabila penataan dilakukan secara manusiawi dan kolaboratif. Pemerintah yang bijak bukan yang menggusur rakyat kecil demi keteraturan kota, tetapi yang mampu menata dengan adil, menjaga martabat manusia, dan menjadikan ruang publik sebagai milik bersama yang tertib sekaligus berkeadilan sosial.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada para pedagang kaki lima di sekitar Kampus Universitas Riau, mahasiswa, serta pihak keamanan kampus yang telah bersedia memberikan informasi dan waktu selama proses pengumpulan data. Penghargaan juga disampaikan kepada Satpol PP Kota Pekanbaru yang telah memberikan penjelasan terkait kebijakan penataan dan dinamika penertiban di lapangan. Ucapan terima kasih ditujukan kepada dosen pembimbing dan pihak institusi yang telah memberikan arahan akademis selama penelitian berlangsung. Dukungan seluruh pihak memungkinkan penelitian ini terselesaikan dengan baik serta memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian mengenai aktivitas ekonomi PKL, mobilitas sosial, dan penataan ruang publik di lingkungan kampus.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrita Nur, Y., Endah, K., & Nurwanda, A. (2025). *Implementasi Kebijakan dalam Penataan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Cihideung K.H Zainal Mustofa Kota Tasikmalaya*. 3(5), 943–951.
- Al kahfi David, M. (2018). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pedagang Kaki Lima Berjualan di Trotoar Jalan Tuanku Tambusai Kota Pekanbaru*. 5, 1–13.
- Fadillah, I. (2018). *Sektor Informal Sebagai Pilihan Rasional Dalam Mengatasi Kemiskinan*.
- Khairullah, M. N., Irdiana, S., & Ariyono, K. Y. (2022). *Strategi Pedagang Kaki Lima Dalam Meningkatkan Pendapatan di Masa Pasca Pandemi Covid 19*. 15(2), 85–96.
- Kinanti Mauren, D., Firdaus, E., & Diana, L. (2024). *Implementasi Perwaki Pekanbaru Nomor 100 Tahun 20215 Tentang Penataan, Pemberdayaan PKL di Kota Pekanbaru*. 3(1), 136–140. <https://doi.org/10.56854/jhdn.v3i1.392>
- Moresta Lativa Aliftania, Utami Estu Nastiti, F. S. (n.d.). *Pola Aktivitas Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam Pemanfaatan Ruang Publik Kawasan Pendidikan di Belakang Kampus Kentingan Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS)*. 11(01), 40–51.
- Munawarah. (2022). *Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Hulu Sungai Utara*. 4(2), 28–33.
- Nurwinda, H., & Listyaningsih, U. (n.d.). *Mobilitas Vertikal Dan Horisontal “Kasus Pedagang Bubur Kacang Hijau” Di Kecamatan Mergangsan, Yogyakarta*.
- Podungge, D., Rachman, E., Hasan, K. K., Bina, U., Gorontalo, T., Bina, U., Gorontalo, T., Bina, U., & Gorontalo, T. (2025). *Penataan Pedagang Kaki Lima Di Area Taman Kota Oleh Dinas*. 7(3), 1448–1454.
- Pulungan, M. S. (2017). *Perlindungan Hukum dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Balikpapan*. 11–21.

- Rahmawati Dwi, W., & Fauzi Mahcfud, A. (2021). *Perebutan Ruang Publik Pedagang Kaki Lima pada Masa Pandemi di Alun-Alun Jombang*. 4(1), 17–32.
- Ramadan, A., Uceng, A., & Muhammad, N. (2025). *Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Efektivitas Penataan Pedagang Kaki Lima di Kelurahan Rappang Kabupaten Sid. 17(1)*, 114–123.
- Sandhika, R. R., Sholihah, A. B., & Yuli, N. G. (2024). *Spatial Configuration & Management Street Vendors in Public Space*. 6(2), 104–114. <https://doi.org/10.14710/jadu.v6i2.21236>
- Setiaji Fikri, A., Firinanda, R., & Lestari Citra Ayu, S. (2023). *Motivasi Semangat Pedagang Kaki Lima: Bungkus atas Dilema Tantangan pada Realitas Diri*. 2(4), 807–815. <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i4.225>
- Suharto, E. (2006). *Kebijakan Sosial*.
- Supriatna, D. (2021). *Penataan Pedagang Kaki Lima (Pkl) Oleh Satpol Pp Dalam Upaya Menjaga Ketentraman Dan Ketertiban*. 3(1), 79–97.
- Wibowo Fitriana Fatma, A., Kaukab Elfan, M., & Putranto, A. (2021). *Pendapatan Pedagang Kaki Lima dan Faktor yang Mempengaruhi*. 2(2), 206–216.
- Widjajanti, R. (2012). *Karakteristik Aktivitas Pedagang Kaki Lima di Ruang Kota (Studi Kasus : Kawasan Pendidikan Tembalang , Kota Semarang)*. 8(4), 412–424.
- Yahya, L., Buana, S., Abdilah, R. A., Rabinah, A. H., Sipil, J. T., Semarang, P. N., Tembalang, S. H., & Semarang, K. (2022). *Pengaruh pedagang kaki lima dan parkir terhadap kinerja jalan di kota semarang*. 08, 80–90.